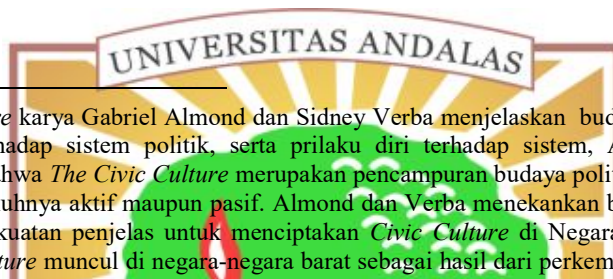


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya politik menjadi salah satu kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut setelah Gabriel Almond dan Sidney Verba menerbitkan buku tentang *The Civic Culture* di lima Negara demokrasi¹ yaitu, Amerika Serikat², Inggris³, Jerman⁴, Italia⁵, dan Meksiko⁶.



¹ *The civic culture* karya Gabriel Almond dan Sidney Verba menjelaskan budaya politik merujuk pada perilaku terhadap sistem politik, serta perilaku diri terhadap sistem, Almond dan Verba menyimpulkan bahwa *The Civic Culture* merupakan pencampuran budaya politik di mana individu tidak selalu sepenuhnya aktif maupun pasif. Almond dan Verba menekankan bahwa penelitiannya tidak memuat kekuatan penjelas untuk menciptakan *Civic Culture* di Negara-Negara yang baru berdiri. *Civic Culture* muncul di negara-negara barat sebagai hasil dari perkembangan politik yang bertahap yaitu berdasarkan sejarah dan karakteristik budaya politik yang meleburkan pola perilaku politik yang lama dengan modern. Almond dan Verba juga menjelaskan mengenai beberapa poin penting dalam kebudayaan politik demokrasi di beberapa negara. Poin pertama yang disampaikan adalah sifat kebudayaan demokratis itu sendiri. Ide-ide besar demokrasi adalah kebebasan individual dan prinsip pemerintahan dari rakyat. Oleh karena itu, partisipasi menjadi penting untuk merealisasikan ide-ide besar tersebut, yaitu signifikansi peran serta rakyat dalam sistem politik. Demokrasi juga mempelajari tentang perilaku dan perasaan individu, sehingga faktor ini membuat demokrasi sukar untuk dipelajari. Poin kedua adalah demokrasi mengkonfrontasikan orang-orang dari belahan dunia lain, seringkali demokrasi terlalu ditekan dengan rasionalnya. Harold Laswell menyumbang ide, paling tidak ada 5 kriteria karakteristik manusia demokratis : (1) ego yang mau untuk terbuka dengan manusia lain, (2) kemauan untuk berbagi nilai dengan manusia lain, (3) percaya dan percaya diri dengan lingkungan pergaulannya, (4) mau menilai sesuatu dari banyak nilai, dan (5) bebas dari kegelisahan. Walaupun demikian, bukan berarti kriteria Laswell ini akan kokoh apabila dihadapkan dengan masyarakat lain, misalkan masyarakat dengan kebudayaan dan adatnya kuat yang umumnya tak demokratis. Penelitian *The Civic Culture* yang dilakukan oleh Almond dan Verba pada Tahun 1963 ini dianggap sebagai *ground breaking* dari ilmu sosial. Melalui penelitian ini, kedua penulis menciptakan teori *civic culture* sebagai penjelasan dari keterlibatan warga negara dalam politik atau kurangnya partisipasi warga negara di negara-negara demokrasi. Penelitian ini juga merupakan upaya pertama untuk mengumpulkan dan menyusun partisipasi warga negara melalui pengukuran variabel secara sistematis dalam lima negara yang berbeda. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 14, Untuk pembahasan lebih lanjut.

² Amerika Serikat dipilih karena menunjukkan pemerintahan dengan sistem demokrasi yang sukses, di Amerika Serikat, pemerintahan yang berdaulat dan bebas telah dimulai dengan adanya lembaga-lembaga Republik, dalam pengertian adanya penolakan terhadap keagungan dan kekeramatan lembaga-lembaga tradisional dan tanpa golongan para aristokrat yang memiliki hak istimewa, fungsi pemerintahan secara relatif cenderung dibatasi, sedangkan kekuasaan birokrasi telah menjadi sasaran rasa kecewa dan kecurigaan. Ideologi masyarakat Amerika Serikat menolak konsepsi fungsi pemerintahan yang otoritarian profesional dan peran yang bersamaan dari warga Negara yang patuh. Perusakan sistem dan korupsi politik akan merusak citra prestasi kekuasaan pemerintah. pola kekuasaan umum dalam sistem sosial masyarakat Amerika Serikat cenderung lebih menekankan kompetensi dan partisipasi politik ketimbang kepatuhan terhadap kekuasaan yang sah. Artinya bahwa Amerika Serikat cenderung mengarahkan masyarakat menjadi peserta aktif.

Dengan kemunculan kajian yang ditulis oleh Almond dan Verba tentang *The Civic Culture* hampir setengah abad yang lampau telah merintis sebuah riset

Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 43-44, Untuk pembahasan lebih lanjut.

³ Selanjutnya dalam perbandingan tentang kebudayaan politik Amerika dan Inggris, Amerika Serikat dan Inggris dipilih karena keduanya menunjukkan pemerintahan dengan sistem demokrasi yang sukses. Beberapa ahli politik mengkaji tentang politik Inggris dengan memberi tanggapan terhadap sikap-sikap tradisional dan otoritas di negara tersebut. Dalam perkembangan sejarah Inggris, budaya demokratis warga negaranya menekankan pada inisiatif dan partisipasi yang dibaurkan dengan kebudayaan politik lama yang menekankan pada kewajiban dan hak warga negara tersebut, di Inggris orientasi subyek yang kuat tetap bertahan meskipun ada pengembangan orientasi partisipan yang lebih aktif. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa warga negara Inggris lebih mungkin memiliki orientasi subyek dan partisipasi yang setia dan bersatu dalam sistem politik dari pada warga negara Amerika Serikat. Dengan demikian Inggris memiliki budaya politik yang diferensial antara budaya politik subyek dan budaya politik partisipan. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 44, Untuk pembahasan lebih lanjut.

⁴ Jerman dipilih sebagai sampel penelitian karena telah mengalami masa pemerintahan yang efektif dalam jangka panjang dan sah sebelum diperkenalkannya pranata-pranata demokrasi, berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi demokrasi dilaksanakan pada akhir abad ke-19, sepanjang proses penyatuan hukum nasional Jerman pada abad ke-19, pola kekuasaan birokrasi secara relatif lebih berhasil dipaksakan pada negara Jerman, termasuk di dalam bangsanya. Telah dibuktikan bahwa sementara Jerman mengembangkan kebudayaan politik subyek, berbagai percobaan yang melibatkan partisipasi demokratis pada abad ke-19 dan pada masa kepemimpinan pemerintahan Weimar tidak pernah mengembangkan kebudayaan politik partisipan yang sangat diperlukan untuk menopang lembaga-lembaga demokrasi ini sekaligus memberi kekuatan dan keabsahan. Jerman memiliki tingkat kepercayaan sosial dan antar personal yang relatif lebih rendah. Di Jerman sebuah orientasi subyek yang pasif masih terus dan belum diseimbangkan oleh orientasi peserta warga negaranya terhadap sistem politik. Kebudayaan politik negara Jerman merujuk kepada keterlepasan politik dan kompetensi subyek dengan kepercayaan diri tentang sistem administrasi. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 44-45, Untuk pembahasan lebih lanjut.

⁵ Italia dan Meksiko juga dilibatkan karena sebagai contoh masyarakat yang kurang maju dan yang memiliki sistem-sistem politik yang transisi. Italia di bagian selatan dan bagian kepulauan terdapat struktur sosial dan politik yang bersifat pra modern. Jika kita analisa sejenak masalah sejarah politik Italia, terbukti bahwa Italia tidak pernah sungguh-sungguh mengembangkan suatu kebudayaan politik rasional yang setia dalam zaman modern. Dan kebudayaan Italia terdiri atas unsur parokial yang sangat ekstrim, serta para subyek, dan partisipan yang sangat terasing, kecenderungan aspirasi demokrasi memang ada dan secara relatif sangat lemah bila dibandingkan dengan kehendak dan tuntutan penolakan yang mempengaruhi sikap mayoritas warga Italia terhadap sistem politik mereka dalam semua aspeknya, maka budaya politik negara Italia mengacu pada budaya politik alienasi dengan rasa percaya diri dan kompetensi yang rendah. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 46-47, Untuk pembahasan lebih lanjut.

⁶ Almond dan Verba juga memilih Meksiko sebagai Negara ke-empat yang dijadikan salah satu penelitian untuk memperoleh gambaran tentang sebuah Negara demokrasi, diluar kawasan Atlantik. Meksiko hampir tidak pernah dipandang sebagai Negara yang mewakili bangsa-bangsa berkembang yang berasal dari Asia dan Afrika. Revolusi Meksiko secara mendalam telah mempengaruhi struktur sosial dan politik serta telah merangsang aspirasi-aspirasi dan harapan demokrasi modern. Meksiko adalah negara yang paling tidak modern dibanding ke lima negara yang di teliti, maksudnya masih banyak terdapat masyarakat desa yang memiliki orientasi tradisional dan angka buta huruf yang tinggi dan budaya politik negara Meksiko yang masih redahnya alienasi dan aspirasi namun masih memiliki rasa percaya diri yang positif. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 47-48, Untuk pembahasan lebih lanjut.

tentang ketertarikan antara budaya dan politik. Mereka menyatakan bahwa setiap proses politik senantiasa terjadi dalam lingkup budaya. Artinya, dalam jangka waktu tertentu akan selalu terjadi proses dialektika antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat di pihak lain. maka budaya politik terus mengalami peningkatan dan banyak para peneliti yang melakukan penelitian tentang kajian budaya politik, seperti penelitian Thomas denk, Henrik Serup Chistenses, dan Daniel Bergh⁷, penelitian Jaharudin, Mohd Hariszuan⁸, dan juga penelitian Gutierrez Chong, Natividad⁹ Khusus untuk peneliti Indonesia, penelitian tentang budaya politik juga di kaji oleh, Syafrudin, Darmawan Purba¹⁰, penelitian Hening Suryo¹¹, dan juga penelitian Kamaruddin Salim.¹²

Buaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-

⁷ Penelitian tentang Komposisi Budaya politik Sebuah Studi Dari 25 Demokrasi di eropa. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses Thomas denk, Henrik Serup Chistenses, dan Daniel bergh. Komposisi Budaya politik Sebuah Studi Dari 25 Demokrasi di eropa. *Journal Studi dalam pengembangan internasional komparatif* 50 (3): 258-377. 2015.

⁸ Penelitian tentang Pilihan Raya Umum Ke-13: Perubahan Budaya Politik Malaysia dan Krisis Legitimasi Moral Barisan Nasional, untuk pembahasan lebih lanjut bisa di akses Jaharudin, Mohd Hariszuan. tentang Pilihan raya Umum Ke-13: Perubahan Budaya Politik Malaysia dan Krisis Legitimasi Moral Barisan Nasional. *Journal kajian Malaysia* 32 (2): 149-169. 2014.

⁹ Penelitian tentang Basis Data untuk Studi Budaya Politik Adat dan Konflik Etnik di Amerika untuk pembahasan lebih lanjut bisa diakses Gutierrez Chong, Natividad Basis Data untuk Studi Budaya Politik Adat dan Konflik Etnik di Amerika. *Journal Studi Antar budaya* 36 (36): 487-486. 2015.

¹⁰ Penelitian tentang Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer. Untuk pembahasan lebih lanjut bisa di akses Safrudin, Darmawan Purba. Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. 1 (1): 52-73. 2017.

¹¹ Penelitian tentang Budaya Politik Negara Maju dan Berkembang untuk pembahasan lebih lanjut bisa di akses Hening Suryo. Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan. *Jurnal Tranformasi I* (27): 1-47. 2015.

¹² Penelitian tentang Politik Identitas Di Maluku Utara. untuk pembahasan lebih lanjut bisa di akses Kamaruddin Salim. Politik Identitas di Maluku Utara. *Jurnal kajian politik dan masalah pembangunan*. 11 (2): 1667-1678. 2016.

partai politik, perilaku aparat negara, partisipasi masyarakat dalam pemilu, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.

Menurut Deninis kavangh, ada dua alasan budaya politik penting untuk dipelajari yaitu, pertama sikap warga negara terhadap sistem politik jelas mempengaruhi macam-macam tuntutan-tuntutan yang diminta, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respon dan golongan elit cadangan dukungan yang baik terhadap rezim yang berkuasa, pokoknya orientasi-orientasinya yang menentukan pelaksanaan sistem politik. Misalnya, tuntutan yang diminta pada sistem respon terhadap undang-undang dan permintaan dukungan, serta tingkah laku individu dalam peranan politik mereka, serta tingkah laku individu dalam peranan politik mereka. Jadi pendekatan budaya politik untuk mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisis interaksi antara sistem politik dan budayanya. Dengan membedakan antara tingkah laku dan sikap kita dapat menjelaskan perbedaan pelaksanaan struktur dan sistem politik dalam budaya.

Kedua, dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistemnya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin akan membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Hal ini terutama relevan dengan kebanyakan ahli politik yang berkecimpung dalam melokalisasi persyaratan-persyaratan pemerintahan yang stabil demokratis.¹³

Budaya politik bukan saja merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, tapi budaya politik dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi

¹³ Beddy Iriawan Maksudi. Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013. hlm 45-46

dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan publik untuk masyarakat.¹⁴ Menurut Almond dan Verba budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik tersebut. Inilah yang menjadi tolak ukur atau kunci kebaharuan penelitian ini. Secara sederhana budaya politik mengacu pada keseluruhan pengetahuan, sikap emosional¹⁵ dan penilaian etika moral¹⁶ yang berkaitan dengan isu-isu politik¹⁷ yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sikap dan tingkah laku inilah menjadi suatu objek penanda gejala-gejala politik¹⁸ yang akan terjadi dalam sistem politik. Dalam setiap masyarakat terdapat budaya politik yang menggambarkan pandangan mengenai proses politik yang berlangsung di lingkungan masyarakat itu sendiri. Budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang. Ketika penelitian ini difokuskan pada tingkat kesadaran partisipasi masyarakat multi etnis



¹⁴ Hening Suryo. Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan. *Jurnal Transformasi I* (27): 1-47. 2015.

¹⁵ Sikap emosional yang dimaksud adalah tentang cara pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan pemerintah.

¹⁶ Etika moral yang dimaksud adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya dalam bermasyarakat.

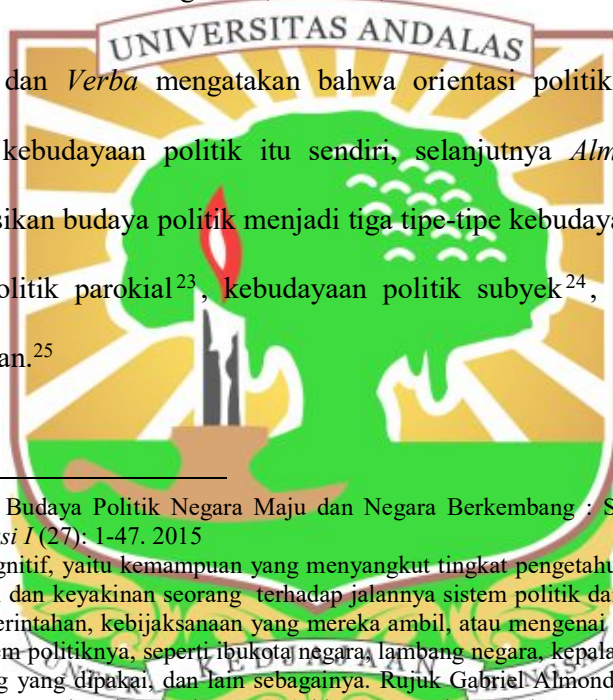
¹⁷ isu politik adalah berita atau masalah politik yang hangat diperbincangkan, tetapi belum jelas kebenarannya.

¹⁸ Gejala politik yang dimaksud adalah membicarakan atau lebih menitikberatkan pada hubungan antara politik, struktur sosial, ideologi, dan budaya.

menjadi salah satu hal yang menarik untuk mengukur kemajuan masyarakat yang sedang berkembang.¹⁹

Menurut Almond dan Verba, ketika mengkaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik, serta sikap peranan kita sendiri dalam sistem politik artinya, jika ingin melihat kebudayaan politik suatu masyarakat, haruslah merujuk pada sistem politik seperti yang diinternalisasikan kedalam kognitif²⁰, afektif²¹, dan evaluatif.²²

Almond dan Verba mengatakan bahwa orientasi politik menjadi syarat utama dalam kebudayaan politik itu sendiri, selanjutnya *Almond dan Verba* mengklasifikasikan budaya politik menjadi tiga tipe-tipe kebudayaan politik, yaitu kebudayaan politik parokial²³, kebudayaan politik subyek²⁴, dan kebudayaan politik partisipan.²⁵



¹⁹ Hening Suryo. *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang : Suatu Perbandingan. Jurnal Transformasi I* (27): 1-47. 2015

²⁰ Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan seorang terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 16. Untuk pembahasan lebih lanjut

²¹ Komponen Afektif, yaitu menyangkut perasaan seorang warga Negara terhadap sistem politik dan peranan yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 16. Untuk pembahasan lebih lanjut

²² Komponen Evaluatif, yaitu menyangkut keputusannya dan praduga tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Rujuk Gabriel Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik*, PT Bumi Perkasa, Jakarta 1984, hlm 16. Untuk pembahasan lebih lanjut

²³ Budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relative rendah), kita dapat membicarakan masalah kebudayaan politik sebagai kebudayaan politik parokial. Secara relatif bahwa budaya politik parokial berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana sehingga spesialisasi politik berada pada jenjang yang paling rendah dan juga orientasi parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.

²⁴ Budaya politik subyek, yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah, mereka secara efektif mereka diarahkan terhadap otoritas tersebut dan mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu.

Kultur sosial yang ada dimasyarakat yaitu masalah etnis menjadi salah satu tema yang menarik untuk dikaji dalam budaya politik. Di mana etnis adalah kelompok social yang di sebut etnis, karena mereka mempunyai satu atau lebih symbol-simbol kebudayaan seperti halnya sebagai akibat dari agama, atau kepercayaan, keturunan, bahasa, kesamaan asal-usul (negeri), gaya hidup dan adat istiadat.²⁶ Jika kita kaitkan dengan budaya politik, etnis sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan politik sekarang ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Syafarudin dan Darmawan purba dengan judul Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer.²⁷

Dalam konteks ini, peneliti mengkaitkan antara Budaya politik dengan pemilihan kepala daerah. Menurut *Almond* ada pola-pola kebudayaan politik yang bisa dilihat dari pemilihan. Artinya, menurut asumsi peneliti dengan Pilkada kita bisa melihat sikap politik yang diambil oleh seseorang atau sekelompok orang yang nantinya akan berujung pada kebudayaan politik seseorang atau sekelompok orang tersebut.

Akan tetapi hubungan terhadap sistem secara umum dan hasilnya bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas yang tersedia didalam kebudayaan politik subyek.

²⁵ Budaya politik partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Dengan kata lain bentuk kultur dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif.

²⁶ Prayudi. Akar Masalah Penyebab Konflik Etnis Dan Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus Di Kalbar dan Kalteng). *Jurnal Ketahanan Nasional IX* (3) 12: 39-59 2004.

²⁷ Hasil penelitian dari Syafrudin dan Dermawan dengan judul analisis orientasi, sikap dan budaya politik etnis lampung era kontemporer dengan hasil penelitian, adanya perubahan kultur politik pada pemuda-pemudi etnis lampung kekinian yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi kelas menengah etnis lampung yang cukup meningkat, serta peran dari partai politik yang gencar melakukan rekrutmen politik, kampanye politik, dan penyerapan aspirasi kamum muda. Orientasi politik pemuda-pemudi etnis lampung tidak hanya berwawasan lokal seputar provinsi Lampung, tapi mampu juga berwawasn regional dan internasional. Rujuk pembahasan lebih lanjut. penelitian Syafrudin, Darmawan Purba, Analisis Orientasi, Sikap, Pilihan, dan Budaya Politik Pemuda-Pemudi Etnis Lampung Era Kontemporer, *Jurnal analisis sosial politik*. 1 (1): 1 53-73. 2017

Di Kabupaten Pasaman Barat dengan masyarakat yang multi etnis yaitu etnis Minang, etnis Jawa, etnis Mandailing telah melakukan beberapa kali pemilihan kepala daerah²⁸ terakhir, dilaksanakan pada Tahun 2015, Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang ikut dalam gelaran Pilkada serentak pada tahun 2015. Pilkada ini digelar untuk memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati untuk periode lima tahun. Ada 3 (tiga) pasang kandidat yang bertarung di Pilkada Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2015, yaitu bisa dilihat pada Tabel 1.1. Berikut ini.

Tabel 1.1 Nama Calon Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Persentase Perolehan Suara
1.	Syahiran – Yulianto	Gerindra- Demokrat	38,78%
2.	Hamsuardi –Kartuni	Hanura – PAN – PKS	26,72%
3.	Zulkenedi Said- Risnawanto	Golkar – Nasdem - PDIP	34,50%
	Total		100%

Sumber : Data Sekunder KPU Pasaman Barat Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dalam Pilkada yang dilakukan di Pasaman Barat pada Tahun 2015 di menangkan oleh pasangan Syahiran-Yulianto dengan perolehan suara 38,78%, Di mana dalam pilkada ini tidak terlepas dari peran etnis di dalamnya. Menurut penelitian yang dilakukan

²⁸ Yaitu pada tahun 2005-2010 dengan bupati terpilih Syahiran dilanjutkan pada Tahun 2010-2015 dengan bupati terpilih Baharuddin R dengan masa jabatan 2010-2015, dan pilkada terakhir pada Tahun 2015-2020 dengan bupati terpilih Syahiran, data sekunder KPU pasaman barat.

Rezki Adminanda²⁹ pada Tahun 2015 mengenai perilaku memilih multi etnis Kabupaten Pasaman Barat, bahwa peran etnis juga berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat walaupun tidak terlalu besar pengaruhnya, dan ini menandakan bahwa Pasaman Barat sendiri, ternyata memiliki beberapa etnis yaitu etnis Minang, etnis Jawa, dan etnis Mandailing.



²⁹ Perilaku memilih masyarakat multi etnis pada pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 merupakan analisis mengenai perilaku memilih yang dilihat dari faktor sosiologis dan rasional yaitu etnisitas, *pemilih retrospektif*, dan patronase politik terhadap pemilih yang ikut memilih pada pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015. Dalam hal ini, etnisitas sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat masuk dalam kategori rendah, dimana sebagian besar masyarakat Pasaman Barat memiliki tingkat etnisitas yang rendah terhadap sentimen memilih kandidat dengan kesamaan etnis yang dipilih. Artinya, Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tidak terpengaruh terhadap kesamaan etnis dengan kandidat yang dipilih serta tingginya etnisitas seseorang tidak mempengaruhi pilihan politiknya pada pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

JUMLAH PENDUDUK JIWA				
KECAMATAN	LAKI-LAKI 2015	PEREMPUAN 2015	LAKI-LAKI + PEREMPUAN 2015	Etnis ³⁰
Pasaman Barat	207.210	203.097	410.307	
Sungai Beremas	12.671	12.030	24.701	Mandailing
Ranah Batahan	13.091	12.902	25.993	Mandailing
Koto Balingka	14.646	14.580	29.226	Mandailing
Sungai Aur	17.955	17.532	35.487	Mandailing
Lembah Melintang	23.126	23.713	46.839	Mandailing
Gunung Tuleh	10.545	10.639	21.184	Minang
Talamau	13.618	13.405	27.023	Minang
Pasaman	37.112	35.989	73.101	Minang
Luhak Nan Duo	21.139	20.778	41.917	Jawa
Sasak Ranah Pasisie	7.399	7.087	14.486	Minang
Kinali	35.908	34.442	70.530	Jawa

Sumber: Data BPS Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 tentang jumlah penduduk Kabupaten Pasaman pada Tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 410.307 jiwa. Dari Tabel di atas bisa di lihat bahwa Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan di mana hampir setiap kecamatan memiliki etnis Minang, Jawa, dan Mandailing.

³⁰ Data campuran dari BPS Kabupaten Pasaman Barat dan hasil wawancara dengan Yulisna Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 23 Mei 2018 di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tidak ada data pasti mengenai etnisitas yang ada di Pasaman Barat.

Peneliti juga melihat tingkat partisipasi dari masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dikatakan cukup tinggi. yaitu sebesar 65,46%, Berdasarkan Tabel 1.3 berikut ini mengenai partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Tahun 2015. Terlihat :

Tabel 1.3 Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015

Pemilih dan Pengguna Hak	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pilih			
Pemilih	114.838	115.948	245.662
Pengguna Hak Pilih	72.419	79.269	160.821
Partisipasi	63,06 %	68,37 %	65,46 %

Sumber : Data Sekunder KPU Pasaman Barat Tahun 2015

Dari Tabel 1.3 pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 dapat di lihat bahwa ada sekitar 245.662 daftar pemilih yang memiliki hak pilih, namun hanya 160.821 penduduk yang menggunakan hak pilihnya. Diantara 160.821 penduduk yang menggunakan hak pilihnya terdapat 155.829 suara yang dinyatakan sah dan 3.793 dinyatakan tidak sah. Jika dikalkulasikan partisipasi memilih masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015, hanya 65,46% yang ikut berpartisipasi.

Peneliti juga melihat ada kecenderungan pemilih masyarakat berdasarkan latar belakang dari Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu berdasarkan etnis, bisa dilihat Tabel 1.4 di bawah ini.

**Tabel 1.4 Hasil Hitung TPS KPU Kabupaten Pasaman Barat
Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015**

N0	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Hasil Perolehan Suara		
				1	2	3
				Hamsuardi - Kartuni	Zulkenedi said - Risnawanto	Syahiran - Yulianto
1.	Gunung Tuleh	14.735	10.401	1.965	2.827	5.449
2.	Kinali	37.068	23.870	5.721	9.911	7.637
3.	Koto Balingka	17.999	11.747	2.889	2.995	5.591
4.	Lembah Melintang	28.776	18.366	9.395	1.408	7.115
5.	Luhak Duo	24.993	17.247	2.365	8.953	5.527
6.	Pasaman	40.985	26.516	5.196	10.587	9.767
7.	Ranah Batahan	16.760	12.156	2.137	2.746	7.065
8.	Sasak Ranah Pasisia	9.084	7.305	641	5.317	1.415
9.	Sungai Aua	21.176	14.296	6.832	1.752	5.259
10.	Sungai Beremas	14.977	8.126	2.167	2.196	3.310
11.	Talamau	19.109	10.791	2.532	5.337	2.591
	Total	245.662	160.821	41.840	54.029	60.726
	Presentase (%)			26,72 %	34,50 %	38,78 %

Sumber : Data Sekunder KPU Pasaman Barat Tahun 2015

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pasangan Syahiran-Yulianto berhasil memperoleh suara sebanyak 60.726 (38,78%), mengungguli pasangan

lainnya Hamsuardi-Kartuni 41.840 (26,72%) dan Zulkenedi Said-Risnawanto dengan perolehan suara 54.029 (34,50%). Dengan demikian hasil dari perhitungan TPS, maka pasangan Syahiran-Yulianto keluar sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan bupati Kabupaten Pasaman Barat periode 2015-2020. Jika dianalisa lebih jauh kemenangan Syahiran-Yulianto memang terdapat pada daerah yang dipadati oleh etnis mandailing, seperti pada Kec. Sungai Beremas, Kec. Ranah Batahan, Kec. Gunuang Tuleh, dan Kec. Koto Balingka.

Sementara untuk pasangan Zulkenedi Said-Risnawanto berhasil mendapatkan suara tertinggi di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Pasaman, dan Kecamatan Talamau yang memang didominasi oleh etnis minang dan jawa. Berbeda halnya dengan pasangan kandidat Hamsuardi-Kartuni yang berhasil mendapatkan suara terbanyak pada Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Sungai Aua yang didominasi oleh etnis mandailing. Dalam analisa kemenangan masing-masing kandidat pada kecamatan-kecamatan yang ada di Pasaman Barat memang tidak dapat dipisahkan dengan faktor sosiologis, dimana keikutsertaan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak terlepas dari adanya kesamaan etnis antara pemilih dengan pasangan calon. Artinya, jika salah satu pasangan calon memiliki etnis tertentu seperti minang misalnya, maka masyarakat yang beretnis minang yang mendominasi di beberapa Kecamatan tertentu, akan cenderung untuk ikut berpartisipasi karena adanya pasangan calon yang memiliki kesamaan etnis dengan mereka. Begitu juga dengan masyarakat dengan pasangan calon yang memiliki kesamaan etnis lainnya.

Dalam tinjauan peneliti, Kabupaten Pasaman Barat ialah sebuah

kabupaten yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti etnis minang dengan jumlah komposisi penduduk mencapai 40%, etnis jawa dengan jumlah komposisi penduduk mencapai 20%, dan etnis mandailing yang berjumlah 40%.³¹ Begitu juga dengan pasangan calon yang maju pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2015 yang lalu, dimana pasangan calon juga memiliki etnis yang bervariasi, diantaranya pasangan dengan etnis Mandailing dan Jawa, pasangan calon dengan etnis Mandailing dan Mandailing, serta pasangan calon dengan etnis Minang dan Jawa.

Peneliti berasumsi bahwa dari data awal yang diperoleh, memperlihatkan adanya kecenderungan bentuk budaya politik subyek di masing-masing kelompok etnis masyarakat pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2015, dimana adanya kecenderungan orientasi politik masyarakat yang cukup mengetahui dan cukup menaruh perhatian terhadap aktivitas politik pada Pilkada, namun masih lebih menonjolkan aspek emosional/perasaan, khususnya keterkaitan emosional etnis yang sama dengan etnis pasangan calon, sehingga orientasi politik mereka untuk terlibat karena adanya afiliasi etnis yang kuat dengan pasangan calon, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun evaluatif, dan kecenderungan partisipasi politik mereka lebih bersifat mobilisasi berdasarkan sentimen etnis.

Kecenderungan bentuk budaya politik tersebut, hampir sama terjadi di masing-masing kelompok etnis. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan dari bentuk budaya politik di masing-masing etnis dalam Pilkada Pasaman Barat tahun 2015 yang lalu, karena pasangan calon yang maju telah mewakili etnisitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang

³¹ Tidak ada data pasti mengenai etnisitas yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat (misal dari BAPPEDA dan CAPIL).

budaya politik masyarakat multi etnis Kabupaten Pasaman Barat dalam Pilkada Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melihat adanya kecenderungan kesamaan orientasi politik masyarakat dengan bentuk budaya politik subyek pada Pilkada Pasaman tahun 2015 meskipun karakteristik masyarakat terdiri dari kelompok multi etnis yang berbeda. Hal ini karena pasangan calon yang maju telah mewakili etnisitas yang ada di masyarakat, sehingga pola orientasi politik atau bentuk budaya politik masyarakat cenderung sama akibat kuatnya hubungan emosional etnisitas dengan pasangan calon yang beretnis sama dengan mereka.

Berdasarkan dari data temuan yang peneliti dapatkan bahwa etnisitas yang ada di Kabupaten pasaman Barat cenderung di mobilisasi untuk memilih salah satu pasangan calon yang ber etnis sama dengan calon bupati pada tahun 2015 dan juga di lihat dari tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi yaitu 64,46% maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana orientasi politik masyarakat multi etnis di Kabupaten pasaman barat.

Agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diteliti secara rinci adalah :

1. Seperti apa bentuk budaya politik masyarakat multi etnis di Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Tahun 2015?
2. Apakah ada perbedaan bentuk budaya politik masyarakat multi etnis di Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada tahun 2015?

1.3.Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bentuk budaya politik masyarakat multi etnis di Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan adanya perbedaan bentuk budaya politik masyarakat multi etnis di Kabupaten Pasaman barat pada Pilkada Tahun 2015.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk budaya politik masyarakat multi etnis di Kabupaten Pasaman Barat pada Pilkada Tahun 2015, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para peneliti yang juga akan meneliti mengenai budaya politik, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam Ilmu Politik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai budaya politik masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pasangan kandidat dan tim suksesnya untuk menghadapi pilkada Kabupaten Pasaman Barat mendatang.

